

ABSTRAK

Salah satu pembiayaan yang paling *best seller* di PT. BPRS SPM Pamekasan adalah pembiayaan jual beli atau murabahah, karena paling mudah dan dianggap paling bermanfaat untuk nasabah yang membutuhkan modal berupa barang tapi tidak mempunyai uang, Namun adakalanya dalam melakukan transaksi pembiayaan para pihak dihadapkan dengan adanya pembiayaan bermasalah atau wanprestasi yang merupakan resiko yang dialami oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam melakukan pembiayaan yang mana resiko tersebut harus ditangani demi mendapatkan keuntungan sesuai dengan akad awal dalam perjanjian seperti menerapkan pembayaran ganti rugi jika ada pihak yang melakukan wanprestasi. Penting untuk memahami bagaimana lembaga keuangan syariah seperti BPRS menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk dalam hal sanksi wanprestasi. Implementasi sanksi perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang adil dan memastikan kesesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019 yang memberikan panduan yang jelas tentang penerapan sanksi wanprestasi dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan dalam menjawab sebuah rumusan masalah yaitu : Bagaimana implementasi sanksi wanprestasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan dan Perspektif Fatwa DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap implementasi sanksi wanprestasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yang berkaitan, sedangkan sumber data sekunder di dapatkan melalui mengutip literatur seperti arsip dokumen yang terkait dalam penelitian, catatan harian, buku-buku, peraturan otoritas jasa keuangan, terutama fatwa DSN MUI. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ada tiga hal yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi wanprestasi pada pembiayaan murabahah belum seluruhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 dimana dalam praktiknya di PT. BPRS SPM Pamekasan dalam penerapan sanksinya tidak sepenuhnya menggunakan biaya ganti rugi, melainkan penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan menggunakan metode pendekatan kekeluargaan seperti musyawarah, dan juga sanksi lelang agunan serta keseluruhan biaya lelang dibebankan kepada nasabah.

Kata Kunci : Implementasi Sanksi, Wanprestasi, DSN MUI

ABSTRACT

One of the best-selling financing at PT. BPRS SPM Pamekasan is buying and selling financing or murabahah, because it is the easiest and considered the most beneficial for customers who need capital in the form of goods but do not have money. However, sometimes in carrying out financing transactions the parties are faced with problematic financing or default which is a risk experienced by the Sharia People's Financing Bank (BPRS) in carrying out financing which risk must be handled in order to obtain benefits in accordance with the initial agreement in the agreement such as implementing compensation payments if there is a party that defaults. It is important to understand how Islamic financial institutions such as BPRS apply sharia principles including in terms of default sanctions. The implementation of sanctions needs to pay attention to fair sharia principles and ensure compliance with the fatwa of the National Sharia Council (DSN) MUI. Fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019 which provides clear guidance on the application of default sanctions in financing products in Islamic financial institutions. In this study, the researcher has the aim of answering a problem formulation, namely: How is the implementation of default sanctions on murabahah financing at PT. BPRS SPM Pamekasan and the Perspective of Fatwa MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 on the implementation of default sanctions on murabahah financing at PT. BPRS SPM Pamekasan.

In this study, the researcher used a qualitative method with a type of field research. There are two data sources used in this study, namely primary data sources and secondary data sources. Primary data sources are obtained through direct interviews with related sources, while secondary data sources are obtained by citing literature such as document archives related to the study, diaries, books, financial services authority regulations, especially DSN MUI fatwas. There are three data collection techniques used by researchers, namely observation, interviews, and documentation.

The result of this research indicate that sanctions for default in murabahah financing are not entirely in accordance with the Fatwa DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 where in practice at PT. BPRS SPM Pamekasan in implementing its sanctions does not fully use compensation costs, but rather completes the financing by extending the financing period and using a family approach method such as deliberation, and also sanctions for collateral autions and the entire auction costs are charged to the customer.

Keywords: *Implementation of Sanctions, Default, DSN MUI*